

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENGGABUNGAN
TAHAP PEMBUKTIAN DAN TAHAP PUTUSAN SIDANG
DALAM SATU WAKTU SIDANG**
(Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh

Afrohatul Laili
NIM 10210052



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENGGABUNGAN
TAHAP PEMBUKTIAN DAN TAHAP PUTUSAN SIDANG
DALAM SATU WAKTU SIDANG
(Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

**Afrohatul Laili
NIM 10210052**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP TAHAP PEMBUKTIAN DAN TAHAP PUTUSAN SIDANG DALAM SATU WAKTU SIDANG (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 September 2014

Penulis,



Atrohatul Laili
NIM 10210052

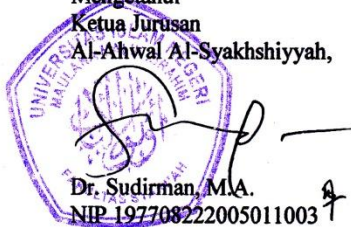
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afrohatul Laili NIM 10210052 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP TAHAP PEMBUKTIAN DAN TAHAP PUTUSAN SIDANG DALAM SATU WAKTU SIDANG (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Malang, 24 September 2014
Dosen Pembimbing,



Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Afrohatul Laili, NIM 10210052, mahasiswa Fakultas Syariah angkatan tahun 2010, dengan judul

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP TAHAP PEMBUKTIAN
DAN TAHAP PUTUSAN SIDANG DALAM SATU WAKTU SIDANG
(Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)**

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP 196509041999032001

(.....)
Ketua

2. Musleh Herry, SH., M.Hum.
NIP 196807101999031002

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP 19651205200031001

(.....)
Penguji utama

Malang, 24 September 2014

Mencetahui

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 196812181999031002

MOTTO

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

(QS. Al-Hasyr : 07)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

ayahanda H. M. Maftuh Makki dan ibunda Miftakhu Rohmah yang tak kenal lelah
memberikan dukungan serta do'a dari awal hingga akhir masa perkuliahan
kagak-kakakku, Mbak Diyah & Mas Nasrul, Mas Sadad, Mas Sadid & Mbak Mata,
adek Furqon yang selalu memberi motivasi untukku
kedua keponakanku mas Haikal dan adek Filza setiap hari membuatku tertawa
dengan semua tingkah lucu kalian
sahabat sekamarku Farah Adibah alias Gembul, terima kasih selama empat tahun
selalu menemaniku baik di waktu senang maupun sedih
serta terima kasih buat semua teman-temanku yang tidak dapat aku sebutkan satu-
persatu

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji Syukur hanyalah untuk Allah swt, Dzat yang telah memberikan serta melimpahkan berbagai nikmat dan karunia khususnya kepada penulis, sehingga bisa terselesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Terhadap Tahap Pembuktiandan Tahap Putusan Sidang Dalam Satu Waktu Sidang (*Studi di Pengadilan Agama Mojokerto*)”** dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw beserta para sahabat yang selalu menuntun kepada jalan yang benaryakni agama Islam.

Penulis banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H.M.FauzanZenrif, M.Ag., selaku Dosen wali yang selalu tidak ada hentihentinya memberi nasehat kepada penulis.
5. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih penulis haturkan segala motivasi, diskusi, masukan, serta bimbingan

dalam penyempurnaan skripsi sampai detik ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang tidak pernah lelah dan selalu memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga Allah swt selalu memberi pahala yang limpah untuk beliau semua.
7. Para bapak hakim yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi tentang pengalaman beliau semoga pengalaman yang telah beliau sampaikan bermanfaat.
8. Orang tua penulis, M. Maftuh Makki dan Miftakhu Rohmah, yang tidak pernah lelah mendoakan serta dukungan untuk penulis dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
9. Saudara-saudara penulis, mbak Diyah , mas Nasrul, mas Sadad, mas Sadid, mbk Mata, dan adek Furqon yang selalu memberi semangat kepada penulis sampai sekarang.
10. Teman-teman penulis, mbak Farak, mbak Evira, adek Suci, yang selalu membantu serta mendukung penulis dari awal penulisan skripsi hingga akhir.
11. Sahabat-sahabat AS angkatan 2010 yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun semangat dari kalian selama kuliah hingga skripsi selesai yang akan selalu penulis sebutkan dalam pelajaran hidup penulis.
12. Terimakasih buat adek-adek Ikatan Mahasiswa Jombang, meskipun hanya dalam pertemuan yang sebentar, namun support dari kalian semua yang membuat penulis lebih bersemangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24September 2014
Penulis,

Afrohatul laili
NIM 10210052

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tan dakoma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh berikut ini :*Al-Imam al Bukhariy*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Aran yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :
Abdurrahman Wahid, Salat, Nikah.

ABSTRAK

Afrohatul Laili, NIM 10210052, 2014. *Pandangan Hakim Terhadap Penggabungan Tahap Pembuktian dan Tahap Putusan Sidang Dalam Satu Waktu Sidang (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Pembuktian dan Putusan Sidang, Satu Waktu Sidang.

Hukum acara merupakan pedoman para hakim dalam melaksanakan proses beracara di peradilan baik berada di lingkup Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama. Dalam undang-undang yang mengatur tentang prosedur beracara di persidangan menyatakan bahwa hakim wajib mengikuti apa yang telah tertulis dalam undang-undangan serta bagaimanapun keadaan yang terdapat di dalam persidangan hakim tidak boleh menyimpang dari hukum acara tersebut.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Fokus terhadap masalah adalah penggabungan dua tahapan yakni antara tahap pembuktian dan putusan yang dijadikan dalam satu waktu sidang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif tentang pandangan majelis hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara dengan menggabungkan dua tahapan, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim lainnya terkait proses penggabungan dua tahapan tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan yaitu para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan mayoritas hakim Pengadilan Agama Mojokerto terkait proses pelaksanaan pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan dua tahapan itu diperbolehkan, sebab penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang tentang Hukum Acara. Oleh sebab itu, tidak terdapat sanksi bagi hakim yang melaksanakan proses penggabungan dua tahapan. Selain itu sebagai pertimbangan lain adalah untuk lebih efisien, baik dari segi waktu ataupun biaya saat proses di persidangan, pendapat ini juga dilandasi dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, terdapat salah satu hakim yang berpendapat bahwa, meskipun proses penggabungan dua tahapan ini tidak melanggar undang-undangan tetapi semestinya penggabungan tersebut tidak dilakukan dengan alasan agar majelis hakim yang menangani perkara dapat lebih memahami pokok perkara dan dapat memberi jawaban akhir berupa putusan dengan seadil-adilnya.

ABSTRACT

Afrohatul, Laili, 10210052, 2014. *The Judges' Perspective in Court's Against Stage Proof and Verdict Session in One Session (A Case Study in Mojokerto Religious Court)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Departement, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor : Musleh Herry, S.H., M. Hum.

Keywords: Judges' Prespective, Court's and Verdict, One Court Session.

Procedural law is the guide for the judges in executing the proccessof civil procedure both in Public Court and Religous Court. A legislation regulating the procedure in a court session stating that a judge is obligated to implement the regulation written in legilation. In addition, the judge cannot deviate from the prosedural law despite any situasion that may occur in the court session.

The matters discussed in the study are related to a case investigation process carried out by the judges in Mojokerto Religious Court. It focuses on the problem of the joining of two stages that is the stage of proof an verdict provision in a court session. The main purpose of the study is comprehensively understanding the panel of judges in executing the case investigation process by joining two stages. Moreover, the syudy also aims to point out other jugdes' perspective regarding the joining process.

This present study employs an empirical method which acquires descriptive data, while the approach used is qualitative approach. Most of the data are primary data which are obtained/collected from the informants, the judges of Mojokerto Religious Court directly. Furthermore, it is supported by the secondary data sources in analysing the result of the study using descriptive qualitative analysis method.

Based on the result of the study, it could be concluded that the majority of Religious Court judges of Mojokerto allows the process of case investigation using the merger of two phases, because this merger is not incompatible to the law of procedural law. Therefore, there is no sanction for the judges who apply the process of two phases merging. Moreover, another consideration is to be more efficient both the time and the cost during the process in the court. This opinion is also based on the principle of simplicity, rapidity and low cost. However, one of the judges argued that although the process of merging these two phases does not break the law but the merger should not be done on the grounds that the judge who hadles the case may more understand the subject matter and possible to give the final answer in the form of fair verdict.

مستخلص البحث

أفرحة ليلي، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، رأي القاضي في ضد المرحلة الإثبات و المرحلة أخذ القرار في موعد واحد للمحاكمة (دراسة في المحكمة الدينية في موجوكرطا). بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: مصلح هيري الماجستير

الكلمات الرئيسية: رأي القاضي، الإثبات وأخذ قرار المحاكم، موعد واحد للمحاكمة

القانون الإجرائي هو المبدأ التوجيهي للقضاة في تسيير الاجراءات في كل المحاكم في نطاق المحكمة العامة وفي المحكمة الدينية. في القانون الذي ينظم إجراءات قضائية في محكمة تنص على أن القضاة ملزمون في إتباع ما هو مكتوب في القانون ولكن الظروف الواردة في القاضي لا ينبغي أن تحيد القانون الإجرائي. والمناقشة في هذه الدراسة تتعلق بعملية التحقيق في القضية التي أجازها قاضي المحكمة الدينية في موجوكرطا، والتركيز في مشكلة دمج مرحلتين أي بين مرحلة الإثبات ومرحلة القرار في موعد واحد للمحاكمة. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو الفهم الشامل حول وجهات نظر القضاة في تنفيذ عملية فحص القضية من خلال الجمع بين المرحلتين، ولمعرفة نظرة القضاة الآخريفي عملية دمج المرحلتين في موعد واحد للمحاكمة. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي نوع من الأبحاث التجريبية، باكتساب البيانات الوصفية، والمدخل المستخدم في هذه الدراسة هي المدخل الكيفي أي النوعي. ومعظم البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الأولية، التي تم جمعها مباشرة من مخبر من قضاة المحاكم الدينية في موجوكرطا. ثم، بدعم من مصادر البيانات الثانوية في تحليل نتائج بحثه باستخدام الطريقة التحليل الوصفي النوعي. وبناء على نتائج هذه الدراسة خلصت إلى أن وجهة نظر القضاة المتعلقة عملية الإجراء البحث الأمر باستخدام جمع الدرجتين جائز لأن ذلك الجمع لا يختلف بأساس القانون الإجرائي. فلذلك لا يجد عقاب لقضى الذي يعمل بجمع الدرجتين. وغير ذلك لترجيح الأخرى هو الكفاية، إما من ناحية الوقت أو المصروف في عملية الإجتماع، يأسس هذا الرأي بأساس بسيط و سريع و مصروف خفيف. لكن رأ إحدى القاضى أن ولو لا يخالف جمع الدرجتين أساسا لكن تلك الجمع لا يعمل بعلّة كي مجلس القضاة التي تفنّد الأمر تستطيع أن تفهم أصل الأمر ويستطيع أن تعطى أجوبة الأخيرة هي الحكم العادل.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Ruang Lingkup Peradilan Agama	17
1. Pengertian Peradilan Agama.....	17
2. Asas-asas Peradilan Agama	19
3. Proses Berperkara di Persidangan.....	23
C. Sekilas Tentang Pembuktian dan Putusan Pengadilan.....	24
1. Pengertian Pembuktian.....	24
2. Macam-macam Alat Bukti	28
3. Pengertian Putusan Pengadilan	43
4. Produk Hakim	45
5. Macam-macam Putusan Hakim	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52

C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data	56
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto.....	60
B. Pandangan Hakim Terhadap Penggabungan Tahap Pembuktian dan Tahap Putusan Sidang Dalam Satu Waktu	62
C. Sanksi Bagi Hakim yang Melaksanakan Proses Penggabungan Tahap Pembuktian dan Tahap Putusan Sidang Dalam Satu Waktu Sidang.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	